

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV dan V maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan *Transit Oriented Development* Melalui Integrasi Transportasi di Kawasan Dukuh Atas, menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Randall. B. Ripley dan Grace. A. Franklin (1986: 232-33) dengan 3 indikator yaitu, Tingkat Kepatuhan, Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Kinerja Pelaksana.

Berikut kesimpulan dari Implementasi Kebijakan *Transit Oriented Development* Melalui Integrasi Transportasi di Kawasan Dukuh Atas.

1. Tingkat Kepatuhan

Tingkat Kepatuhan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi selama penerapan kebijakan itu terlaksana dengan baik. Tingkat Kepatuhan yang telah dilakukan terkait dengan pemahaman perubahan peraturan gubernur, tugas-tugas hingga penetapan pengelola kawasan dalam menjalankan peraturan gubernur tersebut sudah dilakukan dengan mentaati dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Indikator kelancaran rutinitas fungsi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dalam menanggapi perubahan peraturan gubernur dari yang lama menjadi peraturan gubernur yang baru sudah dilakukan secara komitmen dan mentaati peraturan gubernur tersebut sehingga yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan atau kelancaran rutinitas fungsi dalam penerapan kebijakan kawasan berorientasi transit sehingga terciptanya kawasan yang layak dan ramah untuk masyarakat pengguna fasilitas ruang publik.

3. Kinerja Pelaksana

Kinerja pelaksana sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pada Pergub Nomor 67 Tahun 2019 dalam pelaksanaan kerjanya masih terdapat kekurangan dikarenakan kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru, namun untuk meningkatkan kinerja pelaksana dibuatkanlah revisi peraturan gubernur, pada perubahan pada peraturan tersebut untuk cara berkoordinasi dengan pengelola kawasan dan sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kritik yang banyak.

6.1 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk mencapai yang kurang, maka didapatkan saran atau masukan yang akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya untuk PT MRT Jakarta sebagai operator utama atau penanggung jawab serta untuk Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai Regulator dan Implementor kebijakan:

Adapun saran tersebut ialah:

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai perubahan pada peraturan gubernur khususnya pada kawasan berorientasi transit dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja sosialisasi yang dilakukan oleh implementor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan yang diakibatkan tidak adanya sosialisasi dan pelibatan masyarakat sebagai pihak yang terdampak atas penerapan peraturan tersebut.
2. Perlu adanya penegasan, pengawasan serta peneguran pada aparatur pelaksana dalam menegakkan peraturan terkait dengan kawasan integrasi transportasi di kawasan berorientasi transit karena aparatur pelaksana yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan tentang kawasan integrasi transportasi sehingga masyarakat bisa menikmati kawasan berorientasi transit tanpa adanya kemacetan dan kepadatan pengunjung di kawasan berorientasi transit khususnya di kawasan dukuh atas.